

ABSTRAK

Awal tahun 2001 merupakan tonggak bersejarah bagi implementasi otonomi daerah karena per 1 januari 2001, UU No. 22 Th. 1999 tersebut di terapkan sebelum akhirnya diganti dengan UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah. sejak saat itu bermunculan daerah-daerah baru tentu saja juga memunculkan sejumlah masalah, salah satunya adalah masalah keuangan daerah. Setiap daerah dituntut harus dapat membiayai diri sendiri melalui sumber keuangan yang dikuasainya. Kota Batu sendiri yang berstatus daerah otonomi baru juga mengalami masalah yang sama. Peranan pemerintahan daerah Kota Batu dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi dan menumbuhkan kemandirian daerahnya.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana kinerja keuangan daerah Kota Batu dalam pelaksanaan otonomi daerah (periode 2004-2008) serta Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya. Untuk menjawab permasalahan diatas digunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe peneltian deskriptif. Untuk mengukur kinerja keuangan daerah Kota Batu digunakan alat analisis berupa derajad desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, elastisitas PAD dan rasio kemandirian keuangan daerah.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan derajat desentralisasi Kota Batu masih rendah dilihat dari kontribusi PAD terhadap keseluruhan Penerimaan daerah rata-rata mencapai 4,48%, kontribusi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Penerimaan Daerah rata-ratanya sebesar 8,63%, kontribusi PAD terhadap keseluruhan Penerimaan Daerah dan kontribusi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Penerimaan Daerah yang mencapai 13,11% serta kontribusi Sumbangan Daerah terhadap Penerimaan Daerah memiliki rata-rata kontribusi sebesar 76,11%. Kapasitas fiskal yang relative baik yaitu sebesar 28 kali lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata kapasitas fiskal standar Jawa Timur, tetapi kebutuhan fiskalnya yang berada pada posisi 317 kali lebih besar dari rata-rata kebutuhan fiskal standar Jawa Timur menunjukkan gap fiskal sebesar sebesar 289, ini berarti terdapat kesenjangan fiskal yang sangat besar. Dilihat dari Rasio kemandirian, rata-rata tiap periodenya sebesar 6%. Dari hasil tersebut, Kota Batu dapat dikatakan kurang mampu dalam melaksanakan otonomi daerah, tingkat kemandirian yang rendah serta dominannya bantuan dari pusat yang masih memberikan kontribusi yang sangat tinggi. Tetapi pertumbuhan tiap sektor-sektor perekonomian yang dimiliki Kota Batu sangat berpengaruh dalam peningkatan pendapatan daerahnya hal ini ditunjukkan oleh elastisitas PAD terhadap PDRB yang perhitungannya dapat dikatakan *elastic*. Upaya ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan juga sangat mendukung terhadap prospek yang bagus untuk menjadi daerah otonomi yang mandiri.

Kata kunci: Otonomi Daerah, Kinerja, Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan Daerah.

ABSTRACT

Beginning in 2001 is a historic milestone for the implementation of regional autonomy as January 1st 2001, law No. 22/1999 is in place before eventually replaced by Law No. 32/2004 on Regional Government. since then emerging new areas, of course, also raises a number of problems, one of which is the region's financial problems. Each district is required to be able to finance themselves through financial resources under their control. Batu city itself with the status of the new autonomous regions are also experiencing the same problem. The role of local government in exploring Batu city and develop a variety of regional potential as a source of local revenue will greatly determine the success of decentralization and regional autonomy grow.

Issues raised in this research is How the financial performance of Batu city in the implementation of regional autonomy (2004-2008 period) and what efforts are undertaken in Batu city government to increase the income sources of the original area. To answer the above problems is used qualitative research methods with the type of descriptive research. To measure the financial performance of the Batu city used in the form of analytical tools as degree of fiscal decentralization, fiscal needs, fiscal capacity, the elasticity of the income sources of the original area and the ratio of local financial independence.

The results of this study indicate the degree of decentralization of Batu city is low its depend on contribution of the income sources of the original area to the overall acceptance region averaged 4.48%, the contribution of the Tax Sharing and Non-Tax Revenue Region of the average of 8.63%, the contribution the income sources of the original area to the overall revenue and contribution the Regional Tax Sharing and Non-Tax Revenue to Local reaching 13.11% and the contribution of the Regional Contribution to the Reception area has an average contribution of 76.11%. Fiscal capacity is relatively good for 28 times higher compared with the average fiscal capacity of the East Java standards, but its fiscal needs positioned at 317 times greater than the average standard fiscal needs of East Java show the fiscal gap for registration 289, This means that there is a fiscal gap is enormous. Viewed from the ratio of independence, the average of each period of 6%. These results, it can be said of Stone less capable in implementing regional autonomy, a low level of independence and dominance of the central assistance still provides a very high contribution. But the growth of each sector of the economy owned by Batu city is very influential in increasing the income of this region indicated by the elasticity of the income sources of the original area to Gross Regional Domestic Product that can be said elastic calculations. Extensification and intensification of the efforts undertaken also very supportive of good prospects to become an independent autonomous regions.

Keywords: Regional Autonomy, Performance, Regional Finance, Regional Financial Performance